

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI KEPADA SUAMI DENGAN ALASAN ADANYA PAKSAAN ORANG TUA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)**

**Oleh:  
SINDY ERSITA**

Fenomena kawin paksa merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak individu, khususnya melalui praktik perjodohan sepihak oleh orang tua tanpa persetujuan anak. Penelitian ini penting mengingat perlindungan hukum terhadap korban kawin paksa, khususnya dalam pembatalan perkawinan belum optimal. Permasalahan yang dibahas, yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim memutus perkara putusan yang dikabulkan dan ditolak dalam pembatalan perkawinan karena paksaan orang tua, serta akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, kasus, dan asas. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan studi kepustakaan dan telaah terhadap empat putusan Pengadilan Agama Kelas IA yang terdiri atas dua putusan yang dikabulkan dan dua yang ditolak. Metode pengolahan data yang digunakan, yaitu seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa dikabulkan apabila unsur paksaan pada Pasal 71 huruf (f) KHI terbukti menurut pertimbangan hakim. Sebaliknya, permohonan ditolak apabila tidak ditemukan bukti kuat atas adanya paksaan menurut pertimbangan hakim. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan, yaitu pembatalan yang dikabulkan menyebabkan perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal, sedangkan apabila pembatalan ditolak, perkawinan tetap sah dan memiliki akibat hukum penuh.

**Kata Kunci:** Pembatalan Perkawinan, Kawin Paksa, Kompilasi Hukum Islam

## **ABSTRACT**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH ISTRI  
KEPADA SUAMI DENGAN ALASAN ADANYA PAKSAAN ORANG TUA  
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)**

**By:  
SINDY ERSITA**

*Forced marriage constitutes a violation of individual autonomy, particularly when it occurs through unilateral matchmaking by parents without the child's consent. This study is significant in light of the inadequate legal protection available to victims of forced marriage, especially concerning the annulment of such marriages. The research addresses two main issues: the legal considerations made by judges in granting or rejecting annulments of marriage based on parental coercion, and the legal implications of annulment under the Compilation of Islamic Law.*

*This study adopts a normative legal research method with a descriptive approach. It employs statutory, case, and conceptual approaches, using secondary data collected through literature review and an analysis of four Class IA Religious Court decisions—two resulting in granted annulments and two in rejections. Data were processed through selection, classification, and systematization, and analyzed using qualitative descriptive methods.*

*The results and discussion show that the judge's legal consideration in granting a marriage annulment due to forced marriage is based on the presence of coercion as stipulated in Article 71 letter (f) of the Compilation of Islamic Law, proven through judicial assessment. Conversely, petitions are rejected if there is insufficient evidence of coercion according to the judge. The legal consequence of a granted annulment is that the marriage is deemed never to have occurred and holds no legal standing from the outset. Meanwhile, if the annulment is rejected, the marriage remains valid and carries full legal effect.*

**Keywords:** *Marriage Annulment, Forced Marriage, Compilation of Islamic Law*